

KOTA MADIUN



LAPORAN KINERJA

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MADIUN**

2022

KOTA MADIUN



LAPORAN KINERJA

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MADIUN**

2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa, Dzat yang Maha Sempurna, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Tahun 2022 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan dalam rangka melaksanakan asas keterbukaan dan akuntabilitas, Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi salah satu bahan bagi Perangkat Daerah dalam mempertimbangkan kondisi yang ada dan bagaimana ke depan suatu program dan kegiatan akan dijalankan. Semuanya harus terukur dan menjadi bagian akuntabilitas kinerja, yang muaranya adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum bisa semakin baik, lebih efisien dan berdaya guna, serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat luas.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini, mulai dari proses persiapan, pendokumentasian, editing dan pengesahan, kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat, khususnya bagi Pemerintah Kota Madiun dalam upaya melakukan peningkatan kinerja, dan umumnya bagi masyarakat Kota Madiun untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Madiun, Januari 2023

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Tujuan Penyusunan	3
1.4. Gambaran Umum	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.1.1. Tujuan	8
2.1.2. Sasaran	8
2.2. Rencana Kinerja	9
2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran	9
2.2.2. Program	10
2.2.3. Kegiatan	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
3.2. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	26
4.1. Kesimpulan Kinerja	26
4.2. Tindak Lanjut	26
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi harapan setiap bangsa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, menjadi arahan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terciptanya *good governance*. Guna terciptanya *good governance* dimaksud diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Hukum dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKj Bagian Hukum Tahun 2022, berpedoman pada tolok ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024, Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Kinerja ini mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah;



3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
9. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022;



13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2022;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2022;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; dan
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3. Tujuan Penyusunan

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Bagian Hukum untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi, dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan:

1. Peningkatan akuntabilitas Bagian Hukum;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Hukum;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya; dan
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

1.4. Gambaran Umum

1.4.1. Struktur Organisasi

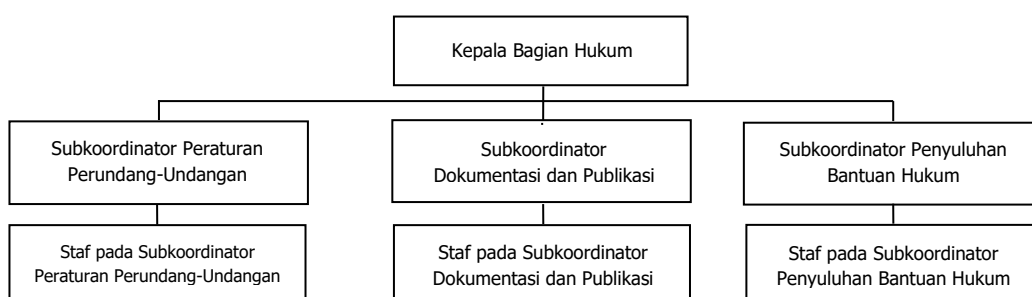
Susunan Organisasi Bagian Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

Bagian Hukum terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bagian yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan staf/pelaksana. Terdapat penunjukan Jabatan Fungsional yang ditugaskan sebagai subkoordinator dan berkedudukan di bawah, serta bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bagian, yaitu:

1. Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan;
2. Subkoordinator Dokumentasi dan Publikasi; dan
3. Subkoordinator Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Dengan susunan organisasi dimaksud, Bagian Hukum dituntut untuk bersikap profesional dan dapat bertindak secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Struktur Bagian Hukum adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Bagian Hukum Tahun 2022



1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Bagian Hukum adalah melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, mempublikasikan, mendokumentasikan produk hukum, serta melaksanakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum.



- Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Hukum;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : Sub Urusan Bencana dan Kebakaran serta Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - c. pelaksanaan penelitian perumusan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah;
 - f. pelaksanaan penghimpunan peraturan perundangundangan, melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan penyuluhan hukum;
 - i. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana Bagian Hukum; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

1.4.3. Sumber Daya Aparatur

Bagian Hukum memiliki sumber daya aparatur sebanyak 13 (tiga belas) orang, terdiri dari 9 (Sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil, 1 (satu) orang Tenaga Kontrak, dan 3 (tiga) orang Tenaga Upahan. Lebih jelasnya, rincian Sumber Daya Aparatur pada Bagian Hukum adalah sebagai berikut:



Tabel 1
Rincian Jumlah Sumber Daya Aparatur Bagian Hukum Tahun 2022
Berdasarkan Eselon, Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jabatan	Eselon			Golongan				Tingkat Pendidikan							Jenis Kelamin		
	IV	III	Total	II	III	IV	Total	S2	S1	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
Fungsional Tertentu	-	-	-	-	5	-	5	-	5	-	-	-	-	5	1	4	5
Fungsional Umum	-	-	-	1	2	-	3	-	1	-	2	-	-	3	-	3	3
Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	2	1	3
Jumlah	-	1	1	1	7	1	9	-	9	-	4	-	-	13	5	8	13



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI WIBOWO, SH**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. AGUNG SULISTYA WARDHANI, M.MKes**

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,

dr. AGUNG SULISTYA W., M.MKes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630106 198903 2 007

Pihak Pertama,

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Bagian Hukum	81 (skor)
2.	Meningkatnya fasilitasi layanan dan informasi produk hukum daerah	Persentase permohonan pelayanan dan informasi produk hukum daerah yang terselesaikan	100%
3.	Meningkatnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan	Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	100%
4.	Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	Persentase capaian kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	100%
5.	Meningkatnya fasilitasi bantuan hukum	Persentase capaian kegiatan fasilitasi bantuan hukum	100%
6.	Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.961.025.120,00	-
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 764.738.000,00	-
JUMLAH		Rp. 2.725.763.120,00	

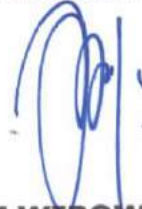
Madiun, 21 Oktober 2022

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MADIUN,**



dr. AGUNG SULISTYA W., M.MKes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630106 198903 2 007

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MADIUN,**




BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kota Madiun
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2022) Murni		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) Murni		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%					
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
SEKRETARIAT DAERAH																											
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80,01	1.961.025.120	0	94.855.327	0	379.795.212	80	430.406.733	0	937.306.739	80	1.842.364.011	100%	94%						Bagian Hukum	
4	1	1	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	1.000.000	0	0	0	0	0	0	76	763.400	76	763.400	76%	76%						Bagian Hukum	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	1.000.000	3	0	0	0	0	3	763.400	6	763.400	100%	76%						Bagian Hukum	
4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	1.277.988.000	2	28.758.106	22	275.860.361	26	335.110.569	41	528.253.329	91	1.167.982.365	91%	81%						Bagian Hukum	
4	1	1	2.02	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	9	1.277.988.000	9	28.758.106	9	275.860.361	9	335.110.569	9	528.253.329	9	1.167.982.365	100%	91%						Bagian Hukum
4	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	170.000.000	12	20.387.683	16	27.649.938	22	37.837.146	49	84.125.230	100	169.999.997	100%	100%						Bagian Hukum	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	170.000.000	11	20.387.683	10	27.649.938	11	37.837.146	19	84.125.230	51	169.999.997	425%	100%						Bagian Hukum
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	6.500.000	0	0	99	6.451.875	0	0	0	99	6.451.875	99%	99%						Bagian Hukum		
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	6.500.000	0	0	1	6.451.875	0	0	0	1	6.451.875	100%	99%						Bagian Hukum	
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	249.644.000	18	43.962.000	26	64.552.540	18	45.521.780	36	90.262.460	98	244.298.780	98%	98%						Bagian Hukum	
4	1	1	2.08	5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	249.644.000	3	43.962.000	3	64.552.540	3	45.521.780	3	90.262.460	12	244.298.780	100%	98%						Bagian Hukum
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	255.893.120	1	1.747.538	2	5.280.498	5	11.937.138	91	233.902.320	99	252.867.594	99%	99%						Bagian Hukum	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	24.500.000	0	1.747.538	1	2.540.498	0	7.715.138	3	12.326.320	4	24.329.494	100%	99%						Bagian Hukum
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	212.500.000	0	0	0	250.000	0	0	1	209.595.000	1	209.845.000	100%	99%						Bagian Hukum
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	21	18.893.120	2	0	3	2.490.000	3	4.222.100	13	11.981.000	21	18.693.100	100%	99%						Bagian Hukum
4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks	80	764.738.000	20	994.000	20	278.354.000	20	112.032.350	20	364.614.483	80	755.994.833	100%	99%						Bagian Hukum	
4	1	2	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk hukum yang disusun	%	100	764.738.000	0,13	994.000	34	278.354.000	15	112.032.350	48	364.614.483	99	755.994.833	99%	99%						Bagian Hukum	
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	21	222.900.000	3	0	6	16.500.000	0	81.000.000	12	125.100.000	21	222.600.000	100%	100%						Bagian Hukum
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	20	215.852.000	0	994.000	0	63.384.000	11	16.384.000	9	127.955.335	20	208.517.335	100%	97%						Bagian Hukum
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	400	325.986.000	76	0	86	198.670.000	95	14.648.350	164	111.559.148	421	324.877.498	105%	100%						Bagian Hukum
Rata-rata capaian kinerja program								2.725.769.120		95.949.327		658.149.212		842.439.083		1.901.921.222		2.598.368.864									

Madiun, 30 Desember 2022
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19/5011/ 199602 1 001

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai serta bersifat jangka menengah, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen Rencana Strategis atau dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra PD merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Hukum mendukung Misi ke-1 Kota Madiun yaitu "Mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*)".

Adapun peran penting Renstra bagi instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi.
2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya *stakeholder* dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan.
3. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik.

Maksud dan tujuan Renstra PD ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama 5 tahun ke depan terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Selanjutnya, dalam penyusunan Renja dan RKA, Bagian Hukum mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah, karena merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Kota Madiun selaku Perangkat Daerah.

2.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan suatu penjabaran atau implementasi dari sebuah misi. Dengan kata lain, tujuan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun dalam rangka mewujudkan misinya.

Selanjutnya rumusan tujuan Bagian Hukum mengacu pada tujuan Sekretariat Daerah, yaitu "Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun".

2.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam batasan waktu tertentu. Sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah; dan
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Rumusan sasaran dan tujuan Bagian Hukum dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2022

Tujuan		Indikator	Target
Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		Nilai EKPPD	Sangat Tinggi
		Nilai AKIP Pemerintah Kota Madiun	BB
		IKM Pemerintah Kota Madiun	84
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31
2.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	80
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penyelenggara Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah 	100% 82,75

2.2. Rencana Kinerja

Rencana kinerja memuat sasaran dan indikator sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Hukum.

2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dari tujuan sebagaimana ditetapkan pada Rencana Strategis, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Bagian Hukum Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Bagian Hukum	81
2.	Meningkatnya fasilitasi layanan dan informasi produk hukum daerah	Persentase permohonan pelayanan dan informasi produk hukum daerah yang terselesaikan	100%
3.	Meningkatnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan	Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%



No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
4.	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	Persentase Capaian Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	100%
5.	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Capaian Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	100%
6.	Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan	100%

2.2.2. Program

Sasaran dan indikator sasaran Bagian Hukum direalisasikan melalui 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Anggaran masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pagu Anggaran Bagian Hukum Tahun 2022

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.961.025.120,00
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 764.738.000,00
Jumlah		Rp. 2.725.763.120,00

2.2.3. Kegiatan

Kegiatan disusun untuk menunjang tercapainya program yang telah ditetapkan. Berdasarkan 2 (dua) program yang diampu Bagian Hukum untuk mewujudkan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan, yaitu:-
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan, yaitu:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan sub kegiatan, yaitu:
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - Fasilitasi Bantuan Hukum; dan
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

Program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2022 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 2.725.763.120,00 dan telah terlaksana.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta untuk mencapai tujuan, pada tahun 2022, Bagian Hukum melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dikandung maksud agar dalam penyelenggaraannya dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Untuk itu pada setiap kegiatannya senantiasa harus berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Penilaian keberhasilan atas Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Tahun 2022 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan target yang ingin dicapai pada Renstra dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama satu tahun.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward and punishment*. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Bagian Hukum pada tahun 2022 beserta analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan tercapainya target masing-masing sasaran. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan beserta analisis capaian kinerja antara lain:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah membandingkan realisasi dan rencana, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Bagian Hukum Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum” dengan Indikator Kinerja “Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Bagian Hukum”

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Bagian Hukum	81	82,85	102,28%

Dari tabel 3.1 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bagian Hukum untuk sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum” dengan indikator kinerja “Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Bagian Hukum” adalah sebesar 102,28%.

Tabel 3.2
Realisasi Tahun 2022 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Bagian Hukum	80,03	82,85

Dari data tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa dari sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum” dengan indikator kinerja “Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Bagian Hukum”, nilai SAKIP Bagian Hukum tahun 2021 sebesar 80,03 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar 82,85 terdapat kenaikan sebesar 2,82 atau 3,40%.

Tabel 3.3
Realisasi Tahun 2022 Dibandingkan dengan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	78,91	80,03	82,85

Dari tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa target nilai hasil evaluasi SAKIP Bagian Hukum pada tahun 2020 sampai dengan 2022 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 Bagian Hukum memperoleh nilai SAKIP sebesar 78,91 dan mengalami kenaikan sebesar 1,12 pada tahun 2021, menjadi sebesar 80,03. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Bagian Hukum berkomitmen untuk selalu meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dengan berupaya melakukan pemenuhan setiap rekomendasi yang diberikan oleh tim penilai.

Nilai hasil evaluasi SAKIP yang diperoleh Bagian Hukum tidak terlepas dari:

- a. Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran dengan melibatkan semua komponen pada Bagian Hukum;
- b. Komitmen Pimpinan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Bagian Hukum;

- c. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; dan
- d. Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran.

2. Sasaran “Meningkatnya Fasilitas Layanan dan Informasi Produk Hukum Daerah” dengan Indikator Kinerja “Persentase Permohonan Pelayanan dan Informasi Produk Hukum Daerah yang terselesaikan”

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya fasilitas layanan dan informasi produk hukum daerah	Persentase permohonan pelayanan dan informasi produk hukum daerah yang terselesaikan	100%	100%	100%

Dari tabel 3.4 di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran “Meningkatnya fasilitas pelayanan dan informasi produk hukum daerah” dengan indikator kinerja “Persentase permohonan pelayanan dan informasi produk hukum daerah yang terselesaikan”, telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung persentase jumlah permohonan pelayanan dan informasi produk hukum daerah yang terselesaikan. Bagian Hukum mendapat nilai sebesar 85,572 atas Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan pada tahun 2022.

Tabel 3.5
Realisasi Tahun 2022 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1.	Meningkatnya fasilitas layanan dan informasi produk hukum daerah	Persentase permohonan pelayanan dan informasi produk hukum daerah yang terselesaikan	100%	100%

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 100%. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 dapat dipertahankan capaian kerjanya.

Hal-hal yang mendorong tercapainya realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditentukan adalah:

- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan melibatkan semua komponen pada Bagian Hukum;
- b. Komitmen seluruh komponen pada Bagian Hukum dalam implementasi SOP; dan
- c. Monitoring dan evaluasi pemberian pelayanan secara berkala.

Tabel 3.6
Realisasi Tahun 2022 Dibandingkan dengan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Meningkatnya fasilitasi layanan dan informasi produk hukum daerah	Persentase permohonan pelayanan dan informasi produk hukum daerah yang terselesaikan	-	100%	100%

Dari tabel 3.6 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 tidak terdapat realisasi, dikarenakan pada tahun tersebut sasaran kinerja "Meningkatnya fasilitasi layanan dan informasi produk hukum daerah" dengan indikator kinerja "Persentase permohonan pelayanan dan informasi produk hukum daerah yang terselesaikan" tidak ditetapkan sebagai capaian kinerja Bagian Hukum.

3. Sasaran "Meningkatnya Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan" dengan Indikator Kinerja "Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan"

Capaian Kinerja Bagian Hukum untuk sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%

Dari tabel 3.7 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bagian Hukum untuk sasaran "Meningkatnya sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan" dengan indikator kinerja "Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan" adalah sebesar 100%. Pengukuran dilakukan dengan menghitung persentase jumlah Raperda yang telah tersusun sesuai kewenangan Bagian Hukum. Pada tahun 2022, jumlah Raperda yang ditetapkan dalam dokumen Propomperda sebanyak 21 Raperda, dan telah tersusun sebanyak 21 Raperda.

Tabel 3.8
Realisasi Tahun 2022 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1.	Meningkatnya sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%

Dari tabel 3.8 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi sasaran dan indikator ini pada tahun 2021 sebesar 100%. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100% telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.9
Realisasi Tahun 2022 Dibandingkan dengan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Meningkatnya sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

Dari tabel 3.9 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi tahun 2022 dibandingkan realisasi tahun 2020 mencapai target yang ditentukan sebesar 100%.

4. Sasaran “Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum” dengan Indikator Kinerja “Persentase Capaian Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum”

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	Persentase capaian kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	100%	100%	100%

Pengukuran capaian dilakukan dengan menghitung persentase jumlah kegiatan penyusunan produk hukum yang telah dilaksanakan, yakni terfasilitasinya penyusunan Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan tersusunnya dokumen Propomperda. Dari ketiga kegiatan tersebut, pada tahun 2022 semuanya telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

Dari tabel 3.10 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran “Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum” dengan indikator kinerja “Persentase capaian kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum” pada tahun 2022 sebesar 100%.

Tabel 3.11
Realisasi Tahun 2022 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1.	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	Persentase capaian kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	100%	100%

Tabel 3.11 di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2021 dan 2022, realisasi kinerja untuk sasaran dan indikator kinerja ini sebesar 100%, maka capaian kinerja yang telah ditargetkan pada dua tahun tersebut telah tercapai.

Tabel 3.12
Realisasi Tahun 2022 Dibandingkan dengan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	Persentase capaian kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	100%	100%	100%

Sedangkan pada tabel 3.12 dijelaskan bahwa realisasi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target 2020 adalah sebesar 100%. Maka, dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

5. Sasaran “Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Hukum” dengan Indikator Kinerja “Persentase Capaian Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum”

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya fasilitasi bantuan hukum	Persentase capaian kegiatan fasilitasi bantuan hukum	100%	100%	100%

Pengukuran capaian berdasarkan perhitungan jumlah persentase capaian kegiatan fasilitasi bantuan hukum yang telah terlaksana. Pada tahun 2022, kegiatan fasilitasi bantuan hukum ditargetkan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yakni Penyuluhan Hukum, Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM), dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (BANKUMASKIN). Kegiatan ini terlaksana sebagaimana target yang telah ditentukan. Apabila dituangkan dalam tabel 3.13 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi sasaran "Meningkatnya fasilitasi bantuan hukum" dengan indikator kinerja "Persentase capaian kegiatan fasilitasi bantuan hukum" adalah sebesar 100%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 3.14
Realisasi Tahun 2022 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1.	Meningkatnya fasilitasi bantuan hukum	Persentase capaian kegiatan fasilitasi bantuan hukum	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.13 di atas, realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 dapat dipertahankan capaiannya sebagaimana target yang ditentukan sebesar 100%.

Tabel 3.15
Realisasi Tahun 2022 Dibandingkan dengan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Meningkatnya fasilitasi bantuan hukum	Persentase capaian kegiatan fasilitasi bantuan hukum	100%	100%	100%

Dari tabel 3.15 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, yakni sebesar 100%.

6. Sasaran “Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah” dengan Indikator Kinerja “Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan”

Pengukuran capaian berdasarkan perhitungan jumlah persentase produk hukum daerah pada tahun sebelumnya yang telah dipublikasikan, baik melalui Buku Himpunan, Lembaran Lepas, Buletin, maupun website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Produk hukum yang telah ditetapkan pada tahun 2022 total sejumlah 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) dokumen, dan semuanya telah dipublikasikan.

Dengan demikian, realisasi kinerja tahun 2022 yang dituangkan dalam tabel 3.16 di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bagian Hukum untuk sasaran “Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah” dengan indikator kinerja “Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan” sebesar 100%, dan telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan	100%	100%	100%

Tabel 3.17
Realisasi Tahun 2022 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1.	Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan	100%	100%

Dari tabel 3.17 di atas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2021 sebesar 100%, sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 100%.

Maka dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100% dan telah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Tabel 3.18
Realisasi Tahun 2022 Dibandingkan dengan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.18 di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 dan target tahun 2020 adalah sebesar 100%. Sehingga, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bagian Hukum untuk sasaran dan indikator kinerja ini telah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bagian Hukum terealisasi sesuai target yang direncanakan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai pendorong keberhasilan misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun yang teridentifikasi dari kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal, meliputi:
 - Sumber Daya Manusia (SDM);
 - Sumber Dana/dukungan dana dari APBD; dan
 - Sarana dan prasarana kantor.
2. Lingkungan Eksternal, meliputi:
 - Dukungan dari dinas/instansi, khususnya dalam rangka penyusunan produk hukum;

- Kesadaran hukum masyarakat;
- Ketersediaan regulasi/peraturan-peraturan/buku-buku referensi hukum sebagai pedoman baik dari Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
- Adanya bimbingan teknis/pelatihan yang dapat diikuti untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM; dan
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Permasalahan yang dihadapi Bagian Hukum yang menjadi penghambat dalam memberikan layanan yang optimal, antara lain:

1. Kurangnya SDM *Legal Drafting*, sehingga tidak seimbang antara jumlah permintaan penelitian dengan SDM yang menangani;
2. Perangkat Daerah pengusul tidak menguasai materi substansi produk hukum yang dirancang, sehingga akan menghambat dalam proses koordinasi dan penyusunan produk hukum;
3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga mengurangi ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku;
4. Kurangnya SDM yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga menghambat proses publikasi/sosialisasi produk hukum melalui media TIK.

Agar kinerja Bagian Hukum bisa lebih meningkat di tahun-tahun selanjutnya, maka diperlukan beberapa upaya, yaitu:

1. Menambah jumlah SDM yang menguasai TIK dan yang menangani *Legal Drafting*;
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknik perancangan peraturan perundangan untuk SDM yang menangani *Legal Drafting* melalui bimbingan teknis/pelatihan *Legal Drafting and Writing*;
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM yang menangani publikasi produk hukum melalui bimbingan teknis/pelatihan/sertifikasi bidang TIK;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kesadaran hukum masyarakat.



3.2. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Dalam mencapai sasaran, indikator kinerja dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Bagian Hukum melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19
Capaian Anggaran Tahun 2022

No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.961.025.120	1.842.364.011	93,94%
2.	Meningkatnya fasilitasi pelayanan dan informasi produk hukum daerah				
3.	Meningkatnya sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan	2. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	764.738.000	755.994.833	98,85%
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum				
5.	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Hukum				
6.	Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah				
Jumlah			2.725.763.120,00	2.598.358.844,00	95,32%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.725.763.120,00 realisasi anggaran yang terlaksana sebesar

Rp. 2.598.358.844,00 sehingga capaian anggaran Bagian Hukum pada tahun 2022 adalah sebesar 95,32%.

Untuk mengetahui efisiensi dari masing-masing sasaran, maka perlu dihitung efisiensinya. Efisiensi diperlukan untuk membandingkan antara Rata-rata Persentase Capaian Kinerja dengan Persentase Penyerapan Anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan.

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata Persentase Capaian Kinerja} - \text{Rata-rata Persentase Penyerapan Anggaran}$$

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Bagian Hukum pada tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20
Efisiensi Penggunaan Anggaran
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

No.	Sasaran	Rata-rata Persentase Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100%	95,32%	4,68%
2.	Meningkatnya fasilitasi pelayanan dan informasi produk hukum daerah			
3.	Meningkatnya sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan			
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum			
5.	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Hukum			
6.	Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah			

Dari penghitungan efisiensi tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,32%, maka diperoleh hasil perhitungan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 4,98%.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan Kinerja

Laporan Kinerja Bagian Hukum Tahun 2022 disusun untuk melaporkan capaian kinerja yang telah dicapai sesuai dengan indikator kinerja dan target dari Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Tahun 2022. Dari sasaran dan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, target yang ditetapkan sudah dapat tercapai dengan optimal. Namun demikian, kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan perlu meninjau kembali dokumen perencanaan, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran sangat kami harapkan untuk lebih menyempurnakan laporan kami.

Dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang semakin tinggi menyebabkan Bagian Hukum harus selalu berusaha melakukan proses pemutakhiran peraturan perundang-undangan, sehingga produk hukum yang tercipta semakin sinkron dan harmoni. Selain itu, dapat mengedepankan efektivitas dan efisiensi terhadap sumber daya dan sumber dana yang ada, serta menjalankan setiap proses-proses dengan cepat dan tepat untuk mencapai kinerja yang maksimal.

4.2. Tindak Lanjut

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi Bagian Hukum, maka diperlukan strategi, kebijakan serta langkah-langkah tindak lanjut pada Tahun 2023 yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada;
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai; dan
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.

